

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kemampuan suatu negara untuk mendukung kegiatan ekonomi sangat bergantung pada sistem keuangannya. Sektor perbankan merupakan salah satu indikator utama dari sistem keuangan dan memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Bank berperan sebagai perantara untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, perusahaan, dan pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.10 tahun 1998, bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menerima dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau bentuk lainnya (Farchah & Kusmargiani, 2020). Bank tidak hanya berfungsi sebagai perantara keuangan resmi, tetapi juga berperan sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana (Fure, 2016).

Sebagai lembaga intermediasi bank harus menjaga kualitas kinerjanya, karena semakin baik kinerja suatu bank maka akan semakin mudah untuk mendapatkan kepercayaan oleh nasabah (*agent of trust*). Sebagai lembaga keuangan, bank memerlukan kepercayaan dari nasabahnya untuk mendukung dan memperlancar kegiatannya (Sukarno & Syaichu, 2006). Kepercayaan menjadi faktor utama dalam memenangkan persaingan industri perbankan. Untuk mencapai kinerja yang baik, perlu dilakukan perbaikan sistem informasi serta peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang handal dengan keterampilan dan keahlian sesuai kebutuhan bank (Sintha, 2014).

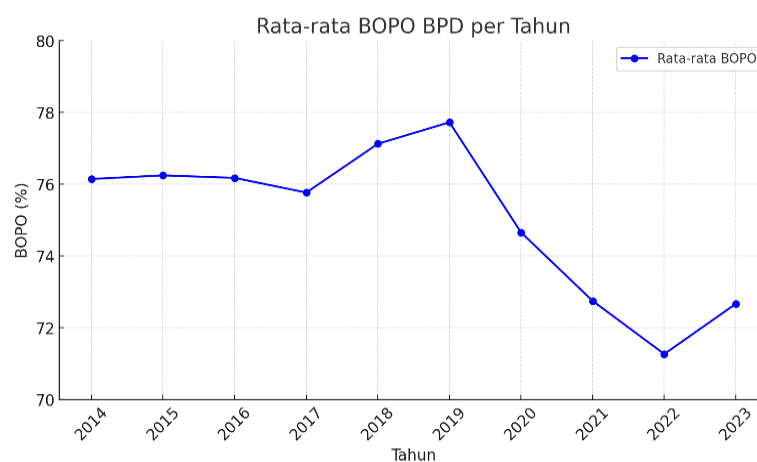
Salah satu bentuk bank nasional yang diharapkan dapat menjadi penggerak perekonomian nasional adalah bank daerah atau Bank Pembangunan Daerah (BPD). Sebagai pengelola kas daerah, BPD bertugas membiayai pelaksanaan usaha dan proyek daerah. Fungsi BPD diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah. Undang-Undang tersebut mengatur bahwa BPD memberikan pinjaman untuk investasi, perluasan, dan pembaharuan proyek pembangunan daerah oleh pemerintah daerah dan usaha campuran antara pemerintah daerah dan sektor swasta (Purwanto, 2019).

BPD berfungsi sebagai penggerak modal dan potensi lokal melalui kerja sama dengan sektor swasta nasional yang progresif untuk mengusahakan pendanaan bagi proyek daerah dalam rangka Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Di era otonomi daerah, Bank Pembangunan Daerah (BPD) menjadi semakin penting sebagai penggerak ekonomi pembangunan daerah (Purwanto, 2019). Namun, minimnya atau tidak gencarnya sosialisasi tentang adanya BPD dan kegunaannya di lingkungan masyarakat, masih belum banyak yang mengetahui tentang BPD, baik dalam hal menabung maupun menggunakan jasanya. Akibatnya, banyak orang yang lebih memilih untuk menggunakan jasa bank umum (Yulita & Pratomo, 2023).

Salah satu indikator penting untuk mengukur kinerja suatu perusahaan secara keseluruhan adalah efisiensi. Efisiensi biasanya didefinisikan sebagai kemampuan suatu perusahaan untuk memproduksi dengan biaya serendah mungkin, efisiensi juga mencakup pengelolaan hubungan input dan output, yaitu bagaimana faktor produk yang tersedia dapat digunakan secara optimal untuk mencapai output yang maksimal. Sebuah perusahaan dianggap lebih efisien jika

ia dapat menghasilkan output lebih banyak dengan menggunakan input lebih kecil. Untuk mencapai kinerja keuangan yang sehat dan berkelanjutan, suatu bank atau sektor perbankan secara keseluruhan harus memperhatikan efisiensi (Abidin & Endri, 2009).

Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) adalah alat yang dapat digunakan untuk mengukur efisiensi operasional perbankan di Indonesia. Menurut kamus keuangan, BOPO adalah kumpulan rasio yang mengukur efisiensi dan efektivitas operasional suatu perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lain (Damar *et al.*, 2021). Menurut Damar *et al.*, (2021), rasio antara biaya operasional dan pendapatan operasional adalah salah satu cara untuk mengukur efisiensi operasional perbankan dari sisi biaya. Sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.1 berikut, bank lebih efisien dalam mengeluarkan biaya operasional jika rasio BOPO nya lebih rendah:



Gambar 1. 1 BOPO Bank Pembangunan Daerah Tahun 2014-2023

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Data BOPO BPD rata-rata per tahun menunjukkan variasi dalam efisiensi operasional. Pada tahun 2014 hingga 2016, BOPO tetap stabil di kisaran 76,15 persen hingga 76,25 persen, menunjukkan efisiensi yang cukup stabil. Namun,

pada tahun 2017, BOPO turun menjadi 75,77 persen, kemudian naik lagi menjadi 77,73 persen pada tahun 2018 dan 2019. Peningkatan ini dapat menunjukkan bahwa biaya operasional lebih tinggi daripada pendapatan operasional. Penurunan ini dapat berasal dari strategi efisiensi yang lebih baik, optimalisasi biaya operasional, atau peningkatan pendapatan operasional dibandingkan dengan beban operasional.

Tingkat efisiensi dapat diukur dengan dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah parametrik, seperti *Stochastic Frontier Approach* (SFA), *Thick Frontier Approach* (TFA), dan *Distribution Free Approach* (DFA). Pendekatan kedua adalah non-parametrik, seperti *Data Envelopment Analysis* (DEA) dan *Free Disposable Hull* (Berger & Humphrey, 1997). Pendekatan DEA mengasumsikan bahwa semua penyimpangan dari batas yang diestimasi adalah inefisiensi. Sedangkan pendekatan SFA menganggap bahwa inefisiensi mengikuti distribusi setengah normal asimetris, sementara fluktuasi acak mengikuti distribusi normal simetris (Chen, 2001). Metode SFA terus berkembang untuk mengevaluasi tingkat efisiensi, dan pada akhirnya, *Software Frontier 4.1* dirilis untuk menghitung fungsi efisiensi dengan data panel (Coelli *et al.*, 2003).

Faktor eksternal seperti variabel makroekonomi, dapat memengaruhi efisiensi. Kondisi makroekonomi adalah fenomena yang terjadi di luar sektor perbankan dan tidak dapat dikendalikan secara langsung oleh perusahaan. Operasi kinerja keuangan perbankan dapat dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi termasuk penentuan keputusan kebijakan yang berkaitan dengan kinerja keuangan bank. Berdasarkan teori ekonomi, dapat diasumsikan bahwa ketika perekonomian berkembang dalam kondisi yang stabil dengan tingkat inflasi yang normal, maka bank dapat meningkatkan profitabilitas dan meningkatkan

efisiensinya. Sebaliknya, ketika perekonomian mengalami depresi dan inflasi terus meningkat, risiko terhadap profitabilitas bank akan semakin tinggi, yang berpotensi mengurangi tingkat efisiensinya (Asngari, 2013).

Salah satu masalah ekonomi yang paling sering terjadi adalah inflasi. Dalam jangka waktu yang panjang dapat menyebabkan kelumpuhan ekonomi di suatu negara. Menurut teori ekonomi Keynesian, inflasi disebabkan oleh keinginan masyarakat untuk melebihi kemampuan mereka, yang mendorong mereka untuk mencari barang yang lebih efisien daripada yang tersedia, yang pada gilirannya menyebabkan kesenjangan inflasi (Meiriza *et al.*, 2024). Inflasi dapat mengurangi keinginan masyarakat untuk berinvestasi, menabung, atau memproduksi. Harga kebutuhan pokok yang terus meningkat membuat masyarakat kewalahan. Inflasi meningkatkan biaya produksi dan operasional bagi perusahaan, sehingga bank akan mengalami kerugian (Wibowo & Syaichu, 2013). Menurut penelitian dari Fauziyah dan Wardana (2022), menyatakan bahwa efisiensi dipengaruhi sebagian oleh inflasi. Penelitiannya dilakukan pada Bank Syariah Indonesia dan Malaysia.

Selain itu, Produk Domestik Regional Bruto adalah indikator penting dari perkembangan ekonomi suatu daerah. Jumlah PDRB yang tinggi menunjukkan lebih banyak permintaan untuk layanan keuangan, yang dapat membantu bank berjalan lebih efisien. PDRB secara teoritis dapat membantu bank untuk mendapatkan keuntungan. Bank sebagai perantara dalam perekonomian, sehingga kenaikan PDRB akan meningkatkan konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan net ekspor meningkat. Oleh karena itu, dalam kondisi normal, interaksi antara ekonomi dan perbankan dianggap sebagai simbiosis mutualisme, atau saling menguntungkan (Jumono, 2022). Chen (2001) melakukan penelitian tentang sejauh mana faktor makroekonomi dari GDP negara dapat mempengaruhi

kinerja bank-bank di Amerika Serikat, yang mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kondisi makroekonomi dapat meningkatkan kinerja bank-bank kecil, namun tidak ada pengaruh terhadap kinerja bank-bank besar.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh *Ianotta et al.*, (2007) mengindikasikan bahwa kinerja bank jauh lebih baik dengan adanya pertumbuhan GDP di 15 negara Eropa. *Profit* bank dan pendapatan bank dapat menentukan kinerja bank yang dipengaruhi oleh pertumbuhan GDP. Menurut *Aviliani et al.*, (2015) mengatakan bahwa ketika kondisi keuangan dan makroekonomi tidak stabil, risiko kredit dan risiko pasar bank meningkat, hal ini dapat mempengaruhi kinerja dan efisiensi bank, jika kondisi makroekonomi suatu negara baik, maka perkembangan perbankan akan menguntungkan demikian pula sebaliknya.

Output dari penelitian ini adalah total penyaluran kredit oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD). Pinjaman yang diberikan oleh BPD berfungsi sebagai tolak ukur utama dalam menilai peran bank dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas akses keuangan, serta meningkatkan efektivitas peran intermediasi keuangan. Namun, Otoritas Jasa Keuangan (2015) menyatakan bahwa kontribusi BPD terhadap pembangunan daerah masih sangat minim, terlihat dari persentase kredit produktif yang masih sangat kecil, yaitu hanya 26 persen (*Satyagraha et al.*, 2022). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam IHPS II-2020 juga berpendapat bahwa Bank Pembangunan Daerah (BPD) masih belum maksimal dalam membantu perekonomian daerah (*Ardianto*, 2021).

Pada struktur aset Bank Pembangunan Daerah (BPD), penyaluran kredit kepada masyarakat merupakan elemen utama. Namun, selain kredit, penempatan dana pada Bank Indonesia dan bank lain juga menjadi bagian penting dalam portofolio aset BPD. Penempatan dana tersebut meliputi giro, deposito, serta

berbagai instrumen keuangan yang disalurkan ke Bank Indonesia maupun bank-bank lain, baik di dalam maupun luar negeri. Tujuan utama dari penempatan ini adalah untuk mengelola likuiditas, memenuhi ketentuan regulasi seperti Giro Wajib Minimum (GWM), serta menghasilkan pendapatan berupa bunga atau imbal hasil (Saragih, 2017). Menurut data dari Statistik Perbankan Indonesia yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penempatan dana pada Bank Indonesia dan bank lain merupakan salah satu pos terbesar dalam aset BPD setelah kredit. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana melalui penempatan pada institusi keuangan lain menjadi strategi penting bagi BPD dalam menjaga likuiditas bank.

Maria dan Anggraeni (2013) menemukan bahwa peningkatan penempatan dana pada bank lain berpengaruh signifikan terhadap efisiensi operasional BPD, yang tercermin melalui rasio BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional). Temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan penempatan dana secara optimal dapat mendukung peningkatan efisiensi bank. Sutanto (2015) menyatakan bahwa tidak semua BPD berhasil mencapai efisiensi secara maksimal. Dari 26 BPD yang diteliti, hanya 12 bank yang mencapai efisiensi sempurna dengan skor 100%, sedangkan sisanya masih belum efisien. Ketidakefisienan tersebut salah satunya disebabkan oleh faktor-faktor seperti tingginya beban bunga serta kebijakan penempatan dana yang kurang tepat.

Banyak BPD masih beroperasi secara tradisional dan belum menggunakan teknologi digital secara optimal. Hal ini dapat menghambat efisiensi operasional dan kemampuan bersaing dengan bank lain yang lebih maju dalam layanan digital (Satyagraha *et al.*, 2022). Selain itu, pangsa pasar BPD yang cukup terbatas di sektor perbankan nasional juga menunjukkan bahwa

dampak BPD terhadap sektor ini masih sangat kecil. Pangsa pasar BPD yang kecil menunjukkan bahwa, dibandingkan dengan bank-bank nasional, BPD kurang kompetitif. Sebagai salah satu lembaga keuangan daerah, keberadaan BPD memiliki arti penting yang sangat strategis dalam perekonomian daerah, terutama dalam hal memajukan perekonomian daerah melalui penyediaan barang dan jasa keuangan yang sesuai dengan tingkat sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, fungsi BPD sebagai konsultan keuangan pengelola keuangan pemerintah daerah menjadi salah satu aspek yang memperkuat posisi strategis dan fundamental BPD dalam perekonomian daerah (Satyagraha *et al.*, 2022).

Penelitian ini akan membahas tentang efisiensi biaya Bank Pembangunan Daerah, dengan menggunakan pendekatan parametrik metode SFA. Namun, penelitian ini berbeda dengan penelitian lain (*research gap*) yang secara khusus berfokus pada efisiensi biaya Bank Pembangunan Daerah konvensional, yang belum banyak diteliti secara mendalam. Sebagian besar penelitian sebelumnya melihat bagaimana karakteristik internal bank, seperti ROA, NIM, NPL, CAR, dan SIZE mempengaruhi efisiensi. Inflasi memiliki dampak negatif tetapi tidak signifikan terhadap efisiensi bank (Yudaruddin, 2017), inflasi memengaruhi efisiensi bank tetapi tidak signifikan, sementara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak memengaruhi efisiensi bank (Sparta, 2017), kebijakan penempatan dana menjadi salah satu penyebab utama ketidakefisienan suatu bank (Sutanto, 2015).

Penelitian ini berfokus pada variabel inflasi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai faktor eksternal atau makroekonomi, serta variabel penempatan pada Bank Indonesia dan penempatan pada bank lain sebagai faktor

internal bank dalam menganalisis efisiensi biaya BPD yang belum banyak diteliti dalam penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas tentang **"ANALISIS EFISIENSI BIAYA BANK PEMBANGUNAN DAERAH KONVENSIONAL TAHUN 2014–2023"**. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana faktor-faktor makroekonomi menggunakan indikator inflasi dan PDRB, serta faktor-faktor internal bank dengan menggunakan indikator penempatan pada Bank Indonesia dan penempatan pada bank lain dapat mempengaruhi tingkat efisiensi biaya Bank Pembangunan Daerah Konvensional di Indonesia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tingkat efisiensi biaya Bank Pembangunan Daerah Konvensional di Indonesia?
2. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh signifikan terhadap efisiensi biaya pada Bank Pembangunan Daerah Konvensional di Indonesia?
3. Apakah inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap efisiensi biaya pada Bank Pembangunan Daerah Konvensional di Indonesia?
4. Apakah penempatan dana pada Bank Indonesia memiliki pengaruh signifikan terhadap efisiensi biaya pada Bank Pembangunan Daerah Konvensional di Indonesia?
5. Apakah penempatan dana pada bank lain memiliki pengaruh signifikan terhadap efisiensi biaya pada Bank Pembangunan Daerah Konvensional di Indonesia?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat efisiensi biaya pada Bank Pembangunan Daerah Konvensional di Indonesia
2. Untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap efisiensi biaya pada Bank Pembangunan Daerah Konvensional di Indonesia
3. Untuk menganalisis pengaruh inflasi terhadap efisiensi biaya pada Bank Pembangunan Daerah Konvensional di Indonesia
4. Untuk menganalisis pengaruh penempatan dana pada Bank Indonesia terhadap efisiensi biaya pada Bank Pembangunan Daerah Konvensional di Indonesia
5. Untuk menganalisis pengaruh penempatan dana pada bank lain terhadap efisiensi biaya pada Bank Pembangunan Daerah Konvensional di Indonesia

### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian tentang pengaruh kondisi makroekonomi terhadap efisiensi BPD konvensional dengan menggunakan metode *Stochastic Frontier Analysis* (SFA) ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi pengetahuan akademik : Penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang literatur akademik dalam bidang efisiensi perbankan. Hasilnya dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin melanjutkan meneliti tentang efisiensi perbankan dengan berfokus pada berbagai faktor atau teknik yang berbeda.

2. Informasi bagi pengambil keputusan di industri perbankan: penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan saran kepada pengambil keputusan di industri perbankan. Penelitian ini dapat membantu manajemen bank membuat keputusan strategis agar dapat meningkatkan efisiensi dan kinerja pada Bank Pembangunan Daerah konvensional secara keseluruhan.